



## Pemdes Segera Rubah APBDes

### Amurang, KOMENTAR

Penanganan wabah Coronavirus-19 (Covid-19) yang populer disebut Korona, perlu sinergitas dari pusat sampai di desa. Karenanya Pemerintah desa (Pemdes) di Minahasa Selatan (Minsel) dimintakan segera merubah Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBDes) untuk disesuaikan dengan penanganan wabah dan dampaknya.

Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDT) telah mengeluarkan surat edaran no 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKDT) yang didalamnya juga memuat menegas APBDes. Karenanya pemerintah desa dalam hal ini Kuntua dapat segera menyusun perubahan untuk penanganan wabah dan dampaknya sesuai isi surat edaran.

"RAPBDes harus segera dirubah menyesuaikan dengan surat edaran menteri. Intinya APBDes tahun ini difokuskan pada penanganan wabah dan terdampak dan perubahan harus segera dilaksanakan. Perubahan disesuaikan kebutuhan desa setempat. Mulai dengan pelaksanaan PKDT, Desa Tanggap Covid-19. Poin-poinnya sudah sangat jelas di dalamnya untuk segera dilaksanakan," sebut Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif P3MD Minsel, Moody Bella.

Dikatakannya juga dalam penyusunan perubahan APBDes, dibahas bersama-sama dengan BPD dan masyarakat. Dimana nantinya disusun dengan skala prioritas dan memenuhi unsur

pada Edaran Menteri DPDTT. Perubahan yang dilakukan juga harus dibuatkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) supaya nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Bila tidak dilakukan dapat berdampak persoalan hukum.

"Harus ada RAB agar penggunaan anggaran penanggulangan Covid-19 di desa jelas dan dapat dipertanggungjawab secara hukum. Program yang disusun dengan RAB contohnya dapat seperti pengadaan bahan cairan disinfektan, pengadaan pelindung diri seperti masker, hand sanitizer, kacamata dan lainnya. Dapat juga dimasukkan cetak leflet untuk sosialisasi, nasi kotak, snack serta sembako bagi masyarakat Miskin. Semua ada di surat edaran dan pada prinsipnya disusun bersama agar dapat sesuai dengan kebutuhan," terangnya.

Bella juga mengatakan APBDes dan RAB harus transparan agar masyarakat dapat mengetahui program yang dibiayai. Sehingga menepis penyalahgunaan anggaran APBDes. Termasuk juga pengatasan organisasi atau perorangan dengan menggunakan anggaran negara. "Transparansi sangat penting sehingga dapat dipantau oleh masyarakat desa. Perlu saya tegaskan bahwa lewat APBDes dapat memenuhi kebutuhan penanggulangan seperti alat kesehatan berupa masker, disinfektan hingga bantuan sembako. Kami dari P3MD akan melakukan pengawasan agar pelaksanaannya tepat sesuai arahan," paparnya.<sup>(vtr)</sup>